

### LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 30 Mei 2022

No. Surat : 180/886/2022/HKm

Alamat Surat

Sekretariat Daerah

DITUJUKAN KEPADA

SEKERTARIAT

- KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- KASUBBAG KEUANGAN
- KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- KASI IDENTITAS PENDUDUK
- KASI PENDATAAN PENDUDUK

BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- KASI KELAHIRAN
- KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

BIDANG PIAK

- KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

BIDANG PDIP

- KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- KASI KERJASAMA
- KASI INOVASI PELAYANAN

Inventarisasi Rencana Pembentukan perda / perkada

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

- Untuk ada Rencana perda / perkada -  
 Dinas Dikembangkan, kalau ada talang di via -  
 sesuai dan format yg ada. // 30 Mei 2022

CATATAN KABID

NO. AGENDA

801 / DUPS / 2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA

30 Mei 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. RM. NOTO SOENARDI NO. 1 TANA PASER 76511  
TELEPON (0543) 21150

Tana Paser, 30 Mei 2022

Nomor : 188 / 886 / 2022 / HKM  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Inventarisasi Rencana Pembentukan  
Perda/Perkada

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Paser

- Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 005/4399-Hk/2022, Tanggal 24 Mei 2022, Hal: Rapat Inventarisasi Perda Kabupaten/Kota, bersama ini kami sampaikan format isian Rencana Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai kewenangan.

Selanjutnya Rencana Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang sudah diisi, dikirim kembali ke Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum paling lambat tanggal 2 Juni 2022 atau email [produkhukumdaerah.2022@gmail.com](mailto:produkhukumdaerah.2022@gmail.com) dan informasi berkaitan dengan pengisian dapat menghubungi Sdri. Titiek Arytha Prihathin,SH (WA. 082154497334) dan Sdri. Nelly Hikmah,SH (WA.081346260929).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si  
NIP. 196612111986091002

**FORMULIR**

**RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

NO	UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN PROSES PEMBENTUKAN PRODUK		TARGET WAKTU PEMBENTUKAN PRODUK (HUKUM**)	PERANGKAT DAERAH SESUAI KEWENANGAN
		TINDAK LANJUT PERDA*)	TINDAK LANJUT PERKADA*)		
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja				
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah				Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil				Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha				Badan Pendapatan Daerah

NO	UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		TARGET WAKTU PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM(**)	PERANGKAT DAERAH SESUAI KEWENANGAN
		TINDAK LANJUT PERDA*)	TINDAK LANJUT PERKADA*)		
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah				Badan Pendapatan Daerah
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN PROSES		TARGET WAKTU PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM**)	PERANGKAT DAERAH SESUAI KEWENANGAN
		PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TINDAK LANJUT PERDA*)	TINDAK LANJUT PERKADA*)		
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan				dst
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan				
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian				
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan				
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang				Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

NO	UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		TARGET WAKTU PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM**)	PERANGKAT DAERAH SESUAI KEWENANGAN
		TINDAK LANJUT PERDA*)	TINDAK LANJUT PERKADA*)		
	Perindustrian				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan			*	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				Dinas Perhubungan
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran				Dinas Perhubungan
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan				Dinas Perhubungan
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian				Dinas Perhubungan
30.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
31.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
32.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
33.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		TARGET WAKTU PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM**)	PERANGKAT DAERAH SESUAI KEWENANGAN
		TINDAK LANJUT PERDA*)	TINDAK LANJUT PERKADA*)		
34.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah				
35.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal				
36.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus				
37.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas				
38.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional				
39.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiharian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/Atau Hak Atas Tanah				
40.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat				
41.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial				
42.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran				
43.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan				

NO	UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN PROSES		TARGET WAKTU PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM**)	PERANGKAT DAERAH SESUAI KEWENANGAN
		PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TINDAK LANJUT PERDA*)	TINDAK LANJUT PERKADA*)		
44.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian				
45.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya				
46.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 tentang Badan Bank Tanah				
47.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan				
48.	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal				
49.	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Geospasial Dasar				
50.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				
51.	Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas				
52.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi				

NO	UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN	KEJERANGAN PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		TARGET WAKTU PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM <sup>*)</sup>	PERANGKAT DAERAH SESUAI KEWENANGAN
		TINDAK LANJUT PERDA <sup>*)</sup>	TINDAK LANJUT PERKADA <sup>*)</sup>		
53.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi				
54.	<sup>****)</sup>				

\*) diisi sesuai rencana pembentukan perda/perkada  
 \*\*) diisi tahun penyusunan  
 \*\*\*\*) dapat ditambahkan sesuai dengan rencana penyusunan produk hukum

Tana Paser, ..... 2022

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)  
 NIP. ....